

Analisis Kompetensi dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pasar Rakyat untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis

(Studi pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Ciamis)

Ading Rahman Sukmara*

Universitas Galuh, Indonesia

*Penulis korespondensi: ading_rahman34@unigal.ac.id^l

Abstract. This research focuses on the strategic role of the people's market as a driver of the regional economy and a source of Regional Original Income (PAD), by taking a case study of the arrangement of the people's market by the Ciamis Regency MSME Office. Using a qualitative approach, data was collected through observation, interviews, and documentation studies. The results of the study show that the Regional Government of Ciamis Regency implements five main strategies in structuring the people's market, including optimizing development and revitalization with ease of access, market development based on potential and local characteristics, cooperation with investors, facilitation and guaranteeing the ease of capital lending through banking, and market promotion using digital technology. This strategy has a significant impact on the achievement of PAD. The achievement of PAD from the people's market sector of Ciamis Regency was recorded to exceed the target in the period of 2015 to 2017, reaching 113.4%, 128.0%, and 121.9%, respectively, although it decreased in 2018 to 87.2%. To optimize regional levy revenue, these findings conclude the need to improve and improve the regional levy management system to support the performance of the apparatus, the implementation of routine activities such as coordination between agencies and socialization to business actors, as well as increasing the discipline, dedication, and honesty of fiscal officials in carrying out their main duties and functions proportionately.

Keywords: Community Welfare; Market Levy; Market Structuring; People's Market; Regional Revenue

Abstrak. Penelitian ini berfokus pada peran strategis pasar rakyat sebagai penggerak ekonomi daerah dan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan mengambil studi kasus penataan pasar rakyat oleh Dinas UMKM Kabupaten Ciamis. Menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis menerapkan lima strategi utama dalam penataan pasar rakyat, meliputi optimalisasi pembangunan dan revitalisasi dengan kemudahan akses, pengembangan pasar berbasis potensi dan ciri khas lokal, kerjasama dengan investor, fasilitasi dan penjaminan kemudahan peminjaman modal melalui perbankan, serta promosi pasar menggunakan teknologi digital. Strategi ini berdampak signifikan pada pencapaian PAD. Capaian PAD dari sektor pasar rakyat Kabupaten Ciamis tercatat melebihi target dalam rentang waktu 2015 hingga 2017, berturut-turut mencapai 113,4%, 128,0%, dan 121,9%, meskipun mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi 87,2%. Untuk mengoptimalkan pendapatan retribusi daerah, temuan ini menyimpulkan perlunya pemberantasan dan peningkatan sistem pengelolaan retribusi daerah untuk menunjang kinerja aparatur, pelaksanaan kegiatan rutin seperti koordinasi antar dinas dan sosialisasi kepada pelaku usaha, serta peningkatan kedisiplinan, dedikasi, dan kejujuran aparat fiskus dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi mereka secara proporsional.

Kata Kunci: Kesejahteraan Masyarakat; Pasar Rakyat; Penataan Pasar; Pendapatan Daerah; Retribusi Pasar

1. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan upaya perbaikan secara terencana menuju kehidupan yang lebih baik. Goulet dalam Syaukani (2004:2) memberikan konsep pembangunan yang berkaitan dengan kebutuhan manusia kepada tiga komponen utama; yakni kelangsungan hidup (*life sustenance*), kehormatan diri (*self esteem*), dan kebebasan (*freedom*). Hal inilah yang ingin dicapai dalam melakukan suatu pembangunan, tidak hanya kelangsungan hidup, namun juga mampu menampilkan kehormatan diri dan kebebasan dengan cara mengedepankan keotentikan, identitas diri, kemuliaan, dan adanya pengakuan. Adapun pembangunan saat ini tidak bisa lepas dengan konsep otonomi daerah yang tengah berjalan.

Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Untuk otonomi daerah diharapkan dapat; (a) menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah, (b) meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, (c) membudayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan. (Mardiasmo, dalam Yesnita, 2016:807-808).

Salah satu titik fokus penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan masyarakat adalah dengan memperbaiki sektor ekonomi, baik sektor formal maupun informal, diantaranya adalah dengan membangun fasilitas-fasilitas umum seperti pasar rakyat. Seiring dengan perkembangan zaman, pasar tidak hanya menjadi tempat transaksi antara penjual dan pembeli melainkan pasar telah menjadi sarana penggerak roda perekonomian dalam skala besar. Selain itu diketahui pula bahwa pasar adalah area tempat jual beli barang dengan penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional, Pertokoan, Mall, Plasa, Pusat Perdagangan, maupun sebutan lainnya (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern). Saat ini perkembangan pasar sangat pesat hampir di setiap daerah, masing-masing daerah berlomba untuk menjadikan kawasan pasar sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam bentuk retribusi.

Dengan demikian perlu upaya penataan dan pembinaan dalam pengelolaan pasar-pasar rakyat tersebut, demi terwujudnya pemerintah daerah yang maju, kuat, mandiri dan demokratis, serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan. Pembangunan pasar-pasar rakyat dapat dilakukan secara mandiri atau melalui kerja sama dengan pihak lain atau swasta. Selain bangunan utama pasar yang berisi lapak atau kios tempat usaha, bangunan pasar juga harus dilengkapi dengan sarana pendukung seperti; kantor pengelola, area parkir, tempat

pembuangan dan pengelolaan sampah sementara, air bersih, sanitasi atau drainase, tempat ibadah, toilet umum, pos keamanan, tempat pengolahan air limbah, hydran dan fasilitas pemadam kebakaran, penteraan, sarana komunikasi, serta area bongkar-muat dagangan.

Adapun berdasarkan hasil survey awal, peneliti menemukan beberapa hal, yakni; kurangnya petugas penarik retribusi di pasar yang dikelola pemerintah daerah, belum satu manajemennya penarikan retribusi pelayanan pasar, belum optimalnya dukungan dana bagi perbaikan sarana, dan prasarana pasar, serta belum optimalnya dukungan operasional bagi penarik retribusi.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka serta berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.(Nasution, 2008:5). Metode deskriptif adalah metode dalam meneliti suatu kelompok manusia suatu obyek suatu kondisi suatu sistem pemikiran atau pun suatu kelas peristiwa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif ini untuk membuat deskripsi atau gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual & akurat mengenai fakta-fakta, serta sifat-sifat dan hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Pada penelitian ini, penulis mencoba untuk membuat sebuah deskripsi mengenai strategi penataan pasar rakyat yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis.

Subjek dalam penelitian ini adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sebagai pelaksana penataan pasar rakyat yang dikelola oleh pemerintah daerah yang sekaligus dijadikan populasi dan sampel.

Sampel dalam penelitian ini adalah *non-probabilitas sampling*, di mana menurut Ashshofa (2014:87) menjelaskan bahwa: “Ciri umum dari sampling ini adalah bahwa tidak semua elemen dalam populasi mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi responden. Tidak ada dasar-dasar yang dapat digunakan, untuk mengukur sampai berapa jauh sampel yang diambil dapat mewakili populasinya”.

Sumber data dalam kegiatan penelitian ini adalah:

- a. *Key Person* yaitu informan kunci yang dipilih secara purposive pada awalnya yang kemudian dikembangkan secara snowball yaitu:
 - 1) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis atau yang mewakili;

- 2) Kepala Bidang Pengelolaan Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis atau yang mewakili;
 - 3) Kepala Seksi Pengembangan Usaha Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis atau yang mewakili;
 - 4) Para Kepala Pasar Tradisional di Kabupaten Ciamis yang tersebar di 4 (empat) lokasi yaitu Pasar Ciamis, Pasar Sindangkasih, Pasar Banjarsari dan Pasar Kawali; dan
 - 5) Informan lain yang muncul kepentingannya di lapangan.
- b. Dokumen, berbagai dokumentasi yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam proses pengumpulan data jika tidak ditemukan lagi variasi informasi atau telah mencapai titik jenuh, maka peneliti tidak lagi mencari informasi baru, dan proses pengumpulan informasi dianggap selesai/telah cukup. Dalam penelitian kualitatif, ada tiga tahap pemilihan informan yang baik jika kita memakai teknik snowball sampling dalam pengumpulan informasi yakni : *pertama*, pemilihan sample awal, yakni berupaya menemukan informan awal untuk diwawancara, *kedua* pemilihan informan lanjutan, guna memperluas deskripsi informasi dan melacak variasi informasi yang mungkin ada, *ketiga* menghentikan pemilihan informan lanjutan, bilamana sudah tidak ditemukan lagi variasi informasi.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Untuk mengetahui mengenai strategi penataan pasar rakyat yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, akan dilihat dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan penulis pada tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan 10 Maret 2019 yang dilakukan di Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Ciamis.

Wawancara diberikan kepada 7 (tujuh) informan atau narasumber yaitu; Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis atau yang mewakili; Kepala Bidang Pengelolaan Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis atau yang mewakili; Kepala Seksi Pengembangan Usaha Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis atau yang mewakili; Para Kepala Pasar Tradisional di Kabupaten Ciamis yang tersebar di 4 (empat) lokasi yaitu Pasar Ciamis, Pasar Sindangkasih, Pasar Banjarsari dan Pasar Kawali; dan Pengurus Pedagang Pasar Ciamis (P3C). Berikut ini adalah rekapitulasi wawancara dari beberapa parameter strategi penataan pasar rakyat yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, yaitu:

Perizinan

Ketentuan mengenai perizinan usaha pasar dan penataannya telah diatur secara jelas dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Melalui regulasi tersebut, proses perizinan pasar rakyat di Kabupaten Ciamis menjadi lebih terarah dan terukur. Penerapan sistem perizinan yang transparan memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan pembinaan secara efektif terhadap pelaku usaha. Selain itu, pengaturan ini juga berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan antara pasar tradisional dan pasar modern agar dapat tumbuh berdampingan secara sehat dan kompetitif.

Tata Ruang

Penerapan tata ruang dan sistem zonasi di pasar rakyat berperan penting dalam menciptakan keteraturan, efisiensi, serta identitas usaha bagi para pedagang. Sebagai contoh, penetapan area tertentu seperti Blok A sebagai pusat penjualan sayuran membantu pembeli dalam menemukan lokasi pedagang dengan lebih mudah, sekaligus menumbuhkan karakter khas pada masing-masing blok. Penataan ruang yang baik tidak hanya meningkatkan kenyamanan aktivitas jual beli, tetapi juga memperkuat daya tarik pasar rakyat di tengah persaingan dengan pasar modern. Dengan demikian, keberadaan tata ruang yang terorganisir menjadi faktor strategis dalam menjaga eksistensi dan daya saing pasar rakyat di Kabupaten Ciamis.

Upaya Intensifikasi

Dalam konteks peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), intensifikasi retribusi pasar merupakan langkah penting yang harus dioptimalkan oleh pemerintah daerah. Upaya ini dapat berjalan efektif apabila terdapat koordinasi yang baik antarinstansi terkait, terutama antara dinas pengelola pasar dan dinas keuangan daerah. Pelaksanaan intensifikasi yang terarah memungkinkan peningkatan penerimaan retribusi tanpa harus menambah beban pajak baru bagi masyarakat. Dengan pengelolaan yang profesional, target PAD dari sektor retribusi pasar dapat tercapai secara optimal sekaligus mendukung kemandirian fiskal daerah.

Upaya Ekstensifikasi

Ekstensifikasi pendapatan melalui sektor pasar rakyat dapat dilakukan dengan memperluas basis penerimaan retribusi, misalnya melalui penataan pedagang baru, optimalisasi pemanfaatan kios kosong, dan pengembangan fasilitas pendukung pasar. Program ini perlu dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah yang mengatur tugas dan

tanggung jawab pengelolaan pasar, agar pelaksanaannya berjalan tertib dan terukur. Selain itu, peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur pengelola pasar juga menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas ekstensifikasi retribusi. Melalui pendekatan tersebut, potensi penerimaan daerah dari sektor pasar rakyat dapat meningkat secara berkelanjutan, sejalan dengan upaya pemerintah Kabupaten Ciamis dalam memperkuat kemandirian ekonomi lokal.

Pembahasan

Strategi Penataan Pasar Rakyat yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah

Dalam melaksanakan strategi penataan pasar rakyat yang dikelola oleh pemerintah daerah maka perlu adanya pembuatan strategi dan mengidentifikasi apa yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung. Berbagai kebijakan dan strategi yang diupayakan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan melalui tidak semata-mata untuk memberikan keunggulan untuk dapat bersaing dengan pasar modern, akan tetapi juga memberikan kemampuan dan pemerataan keadilan terhadap semua pedagang. Agar pasar tidak dikuasai oleh mereka yang mempunyai modal besar dan dapat secara bebas menjual jenis barang dagangan yang dibutuhkan calon pembeli.

Dengan adanya upaya kebijakan dan strategi yang dilakukan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, maka setiap pedagang dapat merasakan dampak positifnya selain itu juga dapat mempertahankan pasar rakyat setelah adanya revitalisasi, agar dapat menunjang keberhasilan dimana diwujudkan dari adanya keadilan dan pemerataan terhadap semua pedagang.

Strategi pemberdayaan diterapkan ke dalam berbagai program yang menggunakan prinsip dasar bahwa apabila mempunyai kesempatan untuk mengambil keputusan secara mandiri, masyarakat akan berbuat yang terbaik bagi diri mereka, keluarga dan masyarakatnya. Dalam hal ini para pedagang besar maupun kecil memiliki kesempatan yang sama untuk dapat berkembang dan bersing lebih baik lagi. Pemberdayaan pasar rakyat, dalam penentuan pasar ada beberapa kriteria pasar yang harus diukur untuk mempermudah penetapan pasar sasaran, yaitu:

- a. Pasar potensial adalah sekumpulan konsumen yang menyatakan tingkat minat yang memadai terhadap penawaran pasar.
- b. Pasar tersedia adalah sekumpulan konsumen yang mempunyai minat, pendapatan, akses dan kualifikasi untuk penawaran pasar tertentu.
- c. Pasar sasaran adalah bagian dari pasar tersedia yang akan dimasuki perusahaan berdasar oleh kesiapan dan kebijakan perusahaan.

Penyelenggaraan perlindungan, pemberdayaan pasar rakyat dan penataan pasar modern, dilaksanakan berdasarkan atas dasar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Penataan Pasar Modern dengan mengacu pada:

- a. Kemanusiaan
- b. Keadilan
- c. Kesamaan kedudukan
- d. Kemitraan
- e. Ketertiban dan kepastian hukum
- f. Kelestarian lingkungan
- g. Kejujuran usaha
- h. Persaingan sehat.

Pemerintah dan pemerintah daerah baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan bidang tugas masing-masing melakukan pembinaan dan pengawasan pasar rakyat, pusat pembelanjaan dan toko swalayan. Dalam rangka pembinaan pasar rakyat, pemerintah daerah:

- a. Mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan; pasar rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Meningkatkan kompetensi perdagangan dan pengelola pasar rakyat;
- c. Memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang pasar rakyat yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi pasar rakyat; dan
- d. Mengevaluasi pengeloaan pasar rakyat. (Ainur rofiq adnan. 2007:72)

Strategi penataan pasar rakyat yang dikelola oleh pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Ciamis sudah sesuai dengan pendapat Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dan Soemitro (2008:384) dan membatasinya pada beberapa parameter pendukungnya yaitu:

- a. Perizinan
- b. Tata ruang
- c. Upaya Ekstensifikasi
- d. Upaya Intensifikasi

Kesimpulan yang diambil mengenai strategi penataan pasar rakyat yang dikelola oleh pemerintah daerah sudah di Dinas UMKM Kabupaten Ciamis diketahui bahwa strategi dalam pengembangan pasar rakyat yaitu:

- a. Optimalisasi Pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat dengan dilengkapi kemudahan akses bagi pengunjung maupun pedagang;
- b. Pengembangan pasar rakyat dengan memanfaatkan potensi dan ciri khas yang dimiliki;

- c. Pengembangan pasar rakyat dengan melakukan kerjasama dengan investor;
- d. Memfasilitasi dan menjamin kemudahan peminjaman modal bagi pedagang melalui kerjasama dengan perbankan; dan
- e. Pengembangan pasar rakyat melalui promosi pasar rakyat kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi.

Capaian Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis yang Diperoleh Dari Sektor Pasar Rakyat

Salah satu pungutan retribusi daerah adalah retribusi pasar. Retribusi pasar ini termasuk dalam retribusi jasa umum yang memberikan kontribusi yang cukup potensial terhadap peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pemerintah daerah harus benar-benar menggunakan hasil retribusi pasar ini dengan sebaik-baiknya. Sebagai tindak lanjut yang di ambil oleh pemerintah daerah dalam mengatasi segala permasalahan yang ada di daerahnya adalah melakukan program dengan meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah utamanya dari sektor pajak dan retribusi daerah sebagai sumber yang potensial dalam rangka mencapai dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, pendapatan daerah sektor retribusi dikatakan cukup potensial dan mempunyai peran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah karena retribusi merupakan pembayaran langsung dari rakyat kepada pemerintah yang tercermin dari adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut.

Retribusi Pasar atau Retribusi Pelayanan Pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat. Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 yang disempurnakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud retribusi pelayanan pasar adalah fasilitas pasar rakyat atau sederhana berupa pelataran, los yang dikelola pemerintah daerah yang khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta. Fasilitas-fasilitas lain yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk pedagang yaitu keamanan, penerangan umum, penyediaan air, telepon, kebersihan dan penyediaan alat-alat pemadam kebakaran. Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut pembayaran atas jasa pelayanan pasar yang disediakan oleh pemerintah daerah. Objek retribusi pasar adalah setiap pemanfaatan sarana/fasilitas pasar yang disediakan dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Subjek retribusi pasar adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas/sarana pasar.

Kabupaten Ciamis merupakan salah satu kota yang mampu menggali potensi daerahnya sendiri. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis salah satunya bersumber dari pos hasil retribusi daerah khususnya reribusi dari pasar. Rasio antara realisasi terhadap rencana untuk pos hasil retribusi daerah pada tahun 2009, 2010, 2012, dan 2013 kesemuanya berada pada tingkat rasio di atas 100%, yaitu berturut-turut sebesar 122,49%; 114,98%; 103,47%; dan 102,85%. Capaian rasio ini dinilai memuaskan/baik.

Berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pasar, diketahui bahwa penyesuaian tarif retribusi pasar dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas pasar, luas lokasi, hak guna bangunan dan jangka waktu pemakaian

Berikut ini adalah struktur dan penyesuaian besaran tarif retribusi berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pasar, selanjutnya struktur dan penyesuaian besaran tarif retribusi berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pasar bervariasi antara kios dan los, struktur besaran tarif untuk kios sebesar Rp. 12.000 dan Rp. 15.000 dan untuk struktur besaran tarif los dimulai dari harga terendah sebesar Rp. 1.000 sampai dengan Rp 3.500.

Selanjutnya dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja capaian rasio ini antara lain adalah:

- a. Tersedianya basis data objek, potensi, dan pemetaan retribusi daerah;
- b. Pengaruh kinerja ekonomi yang mampu meningkatkan produk domestik regional bruto dan pendapatan asli daerah.

Jumlah kios dan los pada 4 (empat) pasar (pasar Ciamis dari tahun 2015-2016 naik sebesar 0,13% untuk kios dan 0,20% untuk los, Pasar Sindangkasih dari tahun 2016-2018 dari tahun 2015 naik sebesar 0,02% untuk kios dan 0,03% untuk los, dan Pasar Kawali dari tahun 2016-2018 dari tahun 2015 naik sebesar 0,07%). Dari data tersebut dapat diketahui bahwa untuk kategori kios dan los mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun, namun jumlah PKL pada 4 (empat) lokasi pasar dari tahun ke tahun tidak mengalami kenaikan.

Dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah dari pengelolaan pasar di Kabupaten Ciamis mengalami kenaikan dan penurunan yang signfikan dari tahun ke tahun. Kenaikan tertinggi diperoleh pada tahun 2017 dengan jumlah pendapatan sebesar Rp. 731.468.844 bila dibandingkan pendapatan tahun sebelumnya yang memperoleh pendapatan sebesar Rp. 703.780.500 pada tahun 2016 dan tahun 2015 sebesar Rp. 632.714.100.

Dari data di atas juga dapat diketahui bahwa realisasi retribusi pasar tergolong kecil karena presentase selisih target dan realisasi memperlihatkan angka yang kecil pula. Angka tersebut juga fluktuatif artinya presentase realisasi penerimaan retribusi pasar tidak menunjukkan angka yang stabil dari tahun ke tahun.

Strategi Penataan Pasar Rakyat yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis

Kebijakan dan strategi yang dilakukan dalam penataan pasar rakyat yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Ciamis misalnya perlu mengacu pada kebijakan-kebijakan yang telah ada. Penataan pasar salah satunya adalah dengan melakukan penataan kepada para pedagang dan berupaya melakukan sosialisasi guna menciptakan suatu kondisi pasar yang lebih tertata rapi agar berfungsi dengan baik dan tidak kalah bersaing dengan pasar swalayan. Dalam hal ini, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan memiliki peran penting sebagai pengatur masalah penataan, pengelolaan, dan pengembangan pasar agar mampu memaksimalkan kinerja yang berkaitan dengan strategi penanganan masalah pasar.

Diperlukan adanya komitmen SKPD dan Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam pelaksanaan strategi yang telah dirumuskan. Komitmen terkait dengan implementasi pengaturan pasar rakyat dan penataan pasar modern untuk menciptakan adanya persaingan yang sehat antara pasar rakyat dengan pasar swalayan.

Dalam penataan pasar rakyat yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Ciamis, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan yang bersumber dari retribusi daerah diantaranya, yaitu:

- a. Pembentahan dan peningkatan sistem dalam menunjang kinerja aparatur terkait pengelolaan retribusi, agar dalam pelaksanaannya bisa berjalan maksimal;
- b. Melakukan kegiatan yang menjadi agenda rutin, seperti melakukan koordinasi dengan dinas terkait dan sosialisasi kepada masyarakat khususnya para pelaku usaha yang usahanya menjadi objek retribusi daerah;
- c. Dalam rangka pencapaian target penerimaan retribusi, maka pihak fiskus harus menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara profesional, dengan definisi aparat atau pegawai yang bertugas dalam menarik retribusi juga perlu untuk meningkatkan kedisiplinan, dedikasi dan kejujuran, tidak mendatangi para pedagang pasar diluar jam kerja dan menarik retribusi diluar ketentuan yang berlaku serta menghindarkan diri dari

perbuatan-perbuatan lainnya yang berpotensi terjadinya pelanggaran hukum dan undang-undangan.

- d. Meningkatkan koordinasi lintas Dinas.
- e. Melaksanakan event promosi pasar rakyat seperti “Gebyar Pasar” yang melibatkan pedagang dan masyarakat.

Diperlukan pengawasan dan monitoring untuk memastikan bahwa strategi dilaksanakan sesuai dengan yang telah dirumuskan dan dapat diketahui sejauh mana strategi tersebut membawa perubahan dalam mencapai visi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Ciamis.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Strategi Penataan Pasar Rakyat yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: Strategi penataan pasar rakyat yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Ciamis telah diarahkan untuk menciptakan pasar rakyat yang tertata, bersih, nyaman, dan berdaya saing dengan pasar modern. Strategi tersebut mencakup:

- a) optimalisasi pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat,
- b) pengembangan potensi khas dan daya tarik lokal setiap pasar,
- c) kemitraan dengan investor dalam pembangunan fasilitas,
- d) pemberian kemudahan akses modal melalui kerja sama dengan lembaga keuangan, dan
- e) promosi pasar rakyat berbasis teknologi informasi.

Upaya-upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat fungsi pasar rakyat sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi pasar rakyat di Kabupaten Ciamis mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, secara umum sektor ini tetap menjadi salah satu penyumbang penting terhadap PAD. Kenaikan PAD pada beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa kebijakan revitalisasi dan pengelolaan pasar yang dilakukan pemerintah daerah mulai menunjukkan hasil positif, terutama dalam meningkatkan partisipasi pedagang dan optimalisasi sarana pasar.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penataan pasar rakyat meliputi perizinan usaha yang tertib, penataan tata ruang yang baik, peningkatan sistem ekstensifikasi dan intensifikasi retribusi, serta peningkatan profesionalitas aparatur pengelola pasar. Penataan tata ruang yang

rapi dan zonasi yang jelas mampu memberikan kenyamanan bagi pedagang maupun pembeli, sementara sistem retribusi yang transparan dan pengawasan yang ketat mendorong peningkatan penerimaan daerah.

Kinerja Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Ciamis dalam mengelola pasar rakyat dapat dikatakan cukup baik, namun masih perlu peningkatan pada beberapa aspek, seperti ketersediaan petugas retribusi yang memadai, pengawasan terhadap penarikan retribusi di lapangan, serta perbaikan infrastruktur pasar di beberapa wilayah. Peningkatan kapasitas SDM aparatur dan digitalisasi sistem pengelolaan pasar juga perlu menjadi perhatian untuk mendukung transparansi dan efisiensi.

Secara keseluruhan, strategi penataan pasar rakyat yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Ciamis berperan penting dalam meningkatkan PAD sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan. Dengan perencanaan yang terarah, koordinasi antar dinas, dan partisipasi aktif masyarakat, pasar rakyat diharapkan dapat terus berkembang menjadi pusat ekonomi lokal yang mandiri, berdaya saing, dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Ciamis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashshofa. (2014). *Metode penelitian hukum*. Rineka Cipta.
- Bogdan, R., & Taylor, S. (2003). *Kualitatif: Dasar-dasar penelitian*. Usaha Nasional.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern*.
- Nasution, A. (2008). *Konsumen dan hukum: Tinjauan sosial, ekonomi dan hukum pada perlindungan konsumen Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan.
- Pemerintah Kabupaten Ciamis. (2011). *Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar*.
- Pemerintah Kabupaten Ciamis. (2016). *Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan*.
- Pemerintah Kabupaten Ciamis. (2016). *Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar*.
- Pemerintah Kabupaten Ciamis. (2016). *Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah*.
- Pemerintah Kabupaten Ciamis. (2017). *Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan*.
- Pemerintah Kabupaten Ciamis. (2018). *Peraturan Bupati Ciamis Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pasar*.

- Syaukani, H. R. (2004). *Otonomi daerah demi kesejahteraan rakyat*. Nuansa Madani.
- Yesnita. (2016). Pengaruh tekanan eksternal, komitmen manajemen, dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah (Studi empiris pada pemerintahan Kota Bukittinggi). *JOM Fekon*, 3(1), 1–15.